

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan nilai, strategi, serta indikator yang sekaligus menjadi dominan setiap negara berkembang. Di Indonesia pelaksanaan kegiatan pembangunan merupakan salah satu hal yang menjadi hak dasar bersifat fundamental bagi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang tertera pada pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (Julianto 2020).

Salah satu permasalahan pembangunan adalah permasalahan perumahan dan pemukiman kumuh yang meluas terjadi di Indonesia. Keberadaan rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok yang penting dalam kehidupan setiap masyarakat. Rumah bukan hanya sebatas bangunan fisik, tetapi keberadaannya dapat mempengaruhi aspek biologis, psikis, dan juga sosial. Syarat fisik sebuah rumah diantaranya haruslah memiliki bangunan yang kuat, aman, dan sehat. Rumah dengan kondisi bangunan yang baik akan membuat pemilik rumah tersebut nyaman dalam menempatnya. Begitu juga sebaliknya, rumah yang tidak nyaman akan membuat hilangnya rasa aman dan nyaman (Putri 2020). Hal ini menjadi agenda penting bagi pemerintah yang telah tertera dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sehingga dari hal tersebut

keberadaan rumah yang layak huni haruslah dimiliki oleh setiap masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hingga tahun 2022 hanya 60,66% rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak, dan sisanya bermukim di hunian yang tidak layak yang mana salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau belum memperoleh rumah yang layak huni adalah adanya keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memperoleh rumah layak huni tersebut terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga mereka hanya tinggal pada rumah yang tidak layak huni.

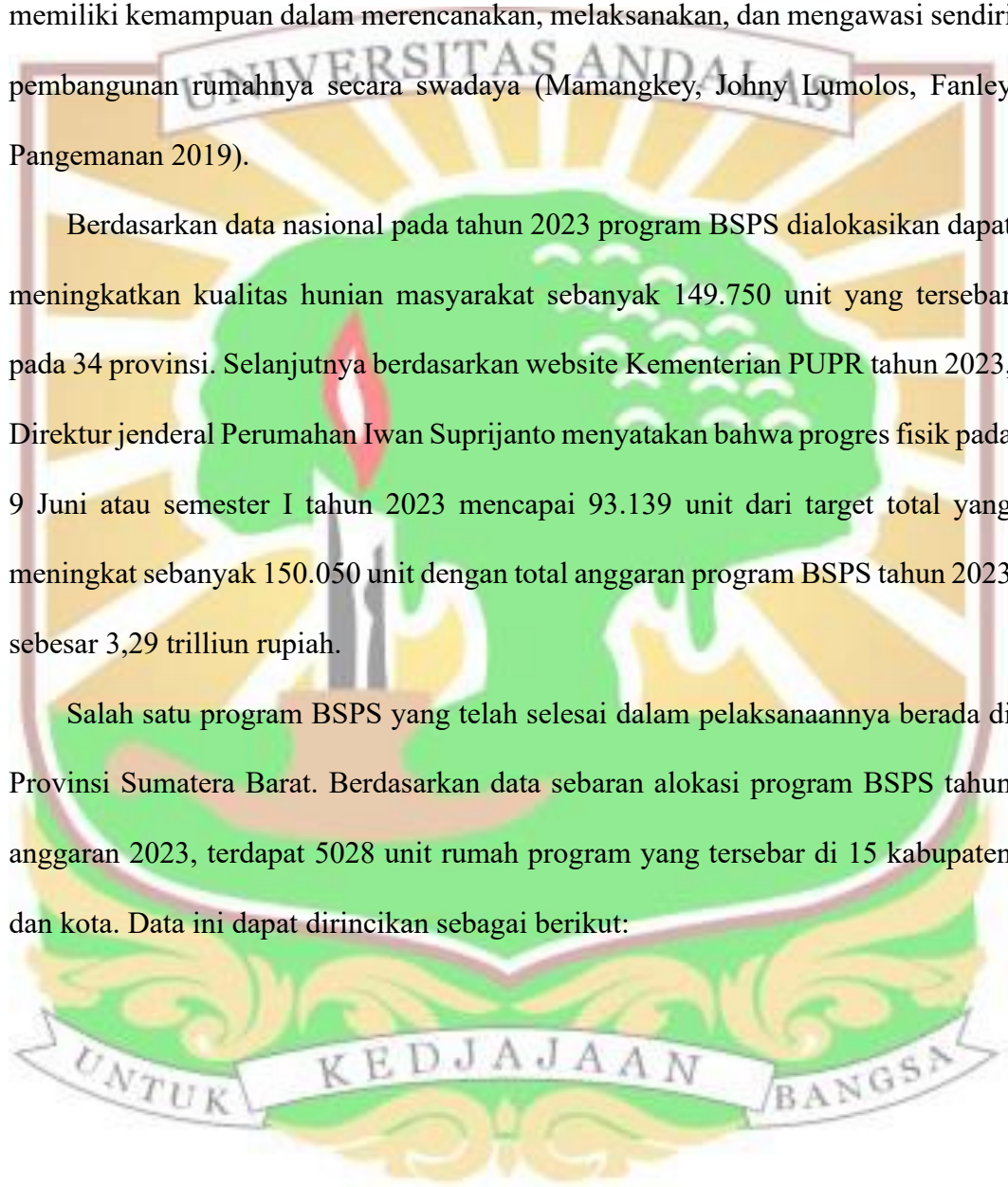
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan program yang disebut dengan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Direktorat Jenderal Perumahan menyatakan bahwa jumlah rumah tangga pada tahun 2023 yang belum menempati rumah layak huni masih berada pada 40-50% sehingga pemerintah menargetkan pada tahun 2024 jumlah masyarakat yang tinggal di rumah yang layak huni bisa mencapai 70%.

Secara umum Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan senilai 20 juta rupiah oleh pemerintah yang diperuntukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah baru beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program pemerintah yang diperuntukan kepada Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) karena mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan untuk memperoleh rumah yang layak huni. Program BSPS pada prinsipnya berupaya mendorong prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya (Mamangkey, Johny Lumolos, Fanley Pangemanan 2019).

Berdasarkan data nasional pada tahun 2023 program BSPS dialokasikan dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat sebanyak 149.750 unit yang tersebar pada 34 provinsi. Selanjutnya berdasarkan website Kementerian PUPR tahun 2023, Direktur jenderal Perumahan Iwan Suprijanto menyatakan bahwa progres fisik pada 9 Juni atau semester I tahun 2023 mencapai 93.139 unit dari target total yang meningkat sebanyak 150.050 unit dengan total anggaran program BSPS tahun 2023 sebesar 3,29 trilliun rupiah.

Salah satu program BSPS yang telah selesai dalam pelaksanaannya berada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data sebaran alokasi program BSPS tahun anggaran 2023, terdapat 5028 unit rumah program yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Data ini dapat dirincikan sebagai berikut:



Tabel 1.1
Data Sebaran Alokasi BPS Tahun Anggaran 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Unit
1.	Kabupaten Agam	635
2.	Kabupaten Dharmasraya	187
3.	Kabupaten Lima Puluh Kota	394
4.	Kabupaten Padang Pariaman	97
5.	Kabupaten Pasaman	465
6.	Kabupaten Pasaman Barat	589
7.	Kabupaten Sijunjung	498
8.	Kabupaten Solok	677
9.	Kabupaten Solok Selatan	100
10.	Kabupaten Tanah Datar	92
11.	Kota Padang	974
12.	Kota Padang Panjang	56
13.	Kota Pariaman	76
14.	Kota Pyakumbuh	55
15.	Kota Solok	133
	Jumlah	5028

Sumber: Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi program BPS tahun anggaran 2023 sebanyak 974 unit yang terdiri dari beberapa kali tahapan penyaluran dan pembangunan unit rumah program. Tahap VII yang berlangsung dari bulan Agustus sampai dengan Desember merupakan tahapan terakhir yang terlaksana pada 2023 di Kota Padang dengan jumlah sebanyak 717 unit rumah program BPS yang tersebar di beberapa kecamatan yang berada di Kota Padang. Berikut data persebaran program BPS di Kota Padang:

Tabel 1.2
Data Penerima Program BSPS Kota Padang Tahap VII Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Unit
1.	Bungus Teluk Kabung	146
2.	Koto Tengah	147
3.	Lubuk Begalung	62
4.	Padang Selatan	1
5.	Kuranji	257
6.	Lubuk Kilangan	26
7.	Nanggalo	26
8.	Pauh	52
	Jumlah	717

Sumber: Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Kecamatan Lubuk Begalung merupakan salah satu kecamatan yang memperoleh program BSPS pada tahun 2023. Kecamatan Lubuk Begalung mendapat alokasi sebanyak 62 unit rumah program yang tersebar di 6 kelurahan yaitu Kelurahan Banuaran Nan XX, Gates Nan XX, Gurun Laweh Nan XX, Koto Baru Nan XX, Pampangan Nan XX, dan Pengambiran Ampalu Nan XX. Berikut ini disajikan table jumlah penerima program BSPS di Kecamatan Lubuk Begalung.

Tabel 1.3
Data Penerima Program BSPS Kecamatan Lubuk Begalung

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Banuaran Nan XX	1
2.	Gates Nan XX	28
3.	Gurun Laweh Nan XX	7
4.	Koto Baru Nan XX	13
5.	Pampangan Nan XX	5
6.	Pegambiran Ampalu Nan XX	8
	Jumlah	62

Sumber: Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menekankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi masyarakat ini

dipandang dari bagaimana masyarakat dalam mengimplementasikan program BSPS di wilayah mereka. Suatu bentuk keberhasilan maupun kegagalan masyarakat dalam mengimplementasikan program BPS dapat terlihat dari jangka waktu pelaksanaan program di lokasi mereka, sehingga setiap partisipasi yang masyarakat lakukan dipandang sebagai tindakan mereka dalam mengimplementasikan program BPS tersebut.

Suatu bentuk keberhasilan implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bukan hanya tergantung pada upaya pemerintah atau pihak terkait, melainkan juga dipengaruhi pada peran aktif masyarakat dalam setiap tahapannya. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku utama yang memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan program ini.

Dalam proses pelaksanaan program BPS yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember di beberapa kelurahan se-Kota Padang, terdapat beberapa kelurahan yang cepat dan lambat dalam proses penyelesaian pembangunan. Dalam hal ini cepat ataupun lambatnya pelaksanaan program tentu dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat dalam melaksanakan program tersebut.

Berdasarkan rapat evaluasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat kelurahan yang paling cepat dalam pelaksanaan program BPS adalah Kelurahan Gates Nan XX. Pada kelurahan ini terdapat 28 penerima bantuan yang terdiri dari 2 Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yaitu KPB Gates 1 dan juga KPB Gates 2.

Kelompok Penerima Bantuan (KPB) merupakan kumpulan dari masyarakat penerima program BSPS di suatu kelurahan pada periode tertentu. Selain masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan program pada rumahnya masing-masing, masyarakat juga diharuskan untuk terlibat dalam kelompok ini sesuai dengan peraturan dan mekanisme dalam pelaksanaan program BSPS.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan atau berjalannya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu program tertentu. Suatu program atau kegiatan dinyatakan berhasil ketika masyarakat ikut serta aktif dalam proses pembangunan melalui program kegiatan yang dibuat. Salah satunya pada program BSPS ini, dimana masyarakat berpartisipasi dalam proses implementasi program mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pemanfaatan. Selain itu, masyarakat juga melakukan partisipasi dalam bentuk pemenuhan swadaya yang mereka lakukan untuk dapat terlibat dalam pelaksanaan program ini.

Program BSPS merupakan program bantuan yang bersifat stimulan sehingga masyarakat diharuskan untuk memenuhi swadaya dalam berbagai bentuk sebagai salah satu persyaratan masyarakat untuk menerima program ini. Upaya swadaya inilah yang seringkali ditemui sebagai permasalahan dalam mengimplementasikan program BSPS di beberapa lokasi. Selain dalam memenuhi swadaya, keterlibatan dalam partisipasi masyarakat pada setiap tahap pelaksanaan menjadi kunci dari keberhasilan ataupun kegagalan implementasi program BSPS.

Keberhasilan masyarakat di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang menjadi salah satu contoh dalam implementasi program

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Keberhasilan dilihat dari berhasilnya masyarakat dalam terlibat dalam setiap tahapan dan hal ini tentu juga dipengaruhi oleh bagaimana bentuk partisipasi yang mereka lakukan. Dalam prinsip perbaikan yang sukses selain dapat mengimplementasikan program, suatu perbaikan harus partisipatif. Perbaikan harus melalui proses partisipatif, yang mengakomodir kebutuhan masyarakat yang diidentifikasi bersama. Hal ini merupakan kunci keberlangsungan proyek. Tanpa partisipasi ini, perbaikan infrastruktur tidak akan dipelihara, kondisinya akan memburuk, orang akan memiliki gambaran yang keliru mengenai pemerintah daerahnya dan investasi dalam perbaikan akan sia-sia. Semakin masyarakat berpartisipasi dalam setiap proses tahapan, maka semakin sukses hasilnya (ESCAP 2008: 16)

Berdasarkan penjelasan mengenai kebutuhan masyarakat dalam memperoleh rumah yang layak huni melalui program BSPS ini, dan bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi untuk mengimplementasikan program, maka peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “Partisipasi Anggota Masyarakat Penerima Bantuan Dalam Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.”

1.2 Rumusan Masalah

Partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses keikutsertaan, keterlibatan, dan kebersamaan warga baik sebagai individu ataupun kelompok sosial atau organisasi kemasyarakatan yang didasari oleh kesadaran masyarakat, baik secara langsung tanpa adanya paksaan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Muluk (2019)

menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup peran serta dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penerima manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi dan kemandirian masyarakat (Hajar, Siti, Irwan Syari Tanjung 2018).

Pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk dapat terlibat aktif dalam mengimplementasikan program. Hal ini seperti dalam upaya pemenuhan swadaya, keterlibatan masyarakat mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pemanfaatan program. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam program ini merupakan aspek penting yang menunjang keberhasilan dari pelaksanaan program BSPS tersebut. Dengan demikian, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana partisipasi anggota masyarakat penerima bantuan dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci atas tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi anggota masyarakat penerima bantuan dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi anggota masyarakat penerima bantuan dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
- b. Mendeskripsikan proses partisipasi anggota masyarakat penerima bantuan dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah literatur khususnya pada bidang ilmu sosiologi
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai bahan referensi karya ilmiah bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun masukan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah terutama dalam aspek pembangunan
- b. Diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan program bersifat pembangunan, serta menjadi bahan evaluasi

bagi pelaksana program dan masyarakat guna memaksimalkan program BPS selanjutnya.

- c. Salah satu syarat memperoleh gelar S-1 pada Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to participate* yang diterjemahkan sebagai peran serta dan keikutsertaan, mengambil bagian atau terkadang juga sebagai berperan serta (Rahim 2004). Partisipasi masyarakat merupakan sumbangsih sukarela dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dalam menjalankan program, dimana mereka ikut menikmati manfaat dari program-program tersebut serta dilibatkan dalam evaluasi program agar dapat mengangkat tingkat kesejahteraan mereka. Pada saat ini banyak ahli mendefinisikan konsep partisipasi, diantaranya adalah:

Menurut Janabrota (Ndraha, 1990:20) mengartikan bahwa partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Dengan demikian partisipasi masyarakat dapat pula berarti kesediaan untuk membantu keberhasilan suatu kegiatan dengan tidak mengorbankan kepentingan yang bersangkutan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa kesediaan untuk membantu tidak dilakukan secara terpaksa, karena proses keterlibatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Mulyadi 2019)

H.A.R Tilaar (2009) menyebut partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakat.

Berdasarkan beberapa definisi partisipasi, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah suatu proses keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan warga sebagai individu ataupun kelompok sosial yang didasari kesadaran warga, baik secara langsung ataupun tidak langsung tanpa paksaan dari pihak-pihak tertentu. Dalam penelitian ini tujuan dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yaitu menjadikan masyarakat memperoleh rumah layak huni dengan memaksimalkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan secara gotong royong yang dibuktikan dengan mekanisme program BSPS tersebut

Menurut Dusseldorp partisipasi diartikan sebagai keadaan atau kegiatan yang mengambil bagian dalam suatu aktifitas untuk mencapai kemanfaatan secara optimal (Suaib, 2017). Dusseldorp mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
4. Menggerakkan sumber daya manusia

5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakat.

Dalam konsep bentuk partisipasi dari Dusseldorp dalam menganalisis penelitian ini, maka dalam program BSPS dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk partisipasi menjadi partisipasi menjadi anggota kelompok sosial masyarakat, melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok, menggerakkan sumber daya manusia, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, dan memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakat.

Bentuk ini terlibat dari masyarakat tergabung kedalam Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Gates 1 dan 2. Masyarakat juga terlibat dalam proses diskusi kelompok yang termasuk pada proses pelaksanaan program BSPS baik untuk menentukan struktur kelompok, pemilihan toko penyediaan bahan bangunan, dan sistem kerja pelaksanaan. Masyarakat juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memanfaatkan hasilnya yaitu masyarakat yang menentukan kebutuhan dari program ini bagian mana yang akan mereka gunakan dan menerima manfaat berupa rumah dengan kriteria layak huni.

Dusseldorp menyebutkan bahwa kata kunci dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dengan adanya kesukarelaan (anggota) masyarakat untuk terlibat atau ikut melibatkan diri dalam proses pembangunan. Dusseldorp (1981) membedakan beberapa jenjang kesukarelaan, yaitu diantaranya:

1. Partisipasi spontan

Peran serta yang tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan dan keyakinan sendiri.

2. Partisipasi terinduksi

Peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (bujukan, pengaruh, dorongan dari luar). Namun individu tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi

3. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan

Peran serta yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peran serta yang dilakukan untuk memenuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat. Jika tidak berperan serta, khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakat.

4. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi

Peran serta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/ tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.

5. Partisipasi tertekan oleh peraturan

Peran serta yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.

Berdasarkan konsep jenjang kesukarelaan yang dikemukakan oleh Dusseldorp maka, dapat dilihat jenjang kesukarelaan masyarakat penerima bantuan masuk klasifikasi partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu peran serta yang dilakukan karena takut kehilangan status sosial atau menderita kerugian/ tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Karena faktor masyarakat berpartisipasi dalam program BSPS ini disebabkan masyarakat ingin

menerima manfaat dari program BSPS ini yang nantinya akan memperoleh dana sebesar 20 juta rupiah untuk perbaikan rumah menjadi rumah dengan kriteria layak huni.

Sedangkan Cohen dan Uphoff (dalam Mulyadi 2019: 25-47) mengklasifikasikan partisipasi menjadi empat jenis:

1. *Participation in decision making*

Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan keputusan melalui perencanaan pembangunan. Masyarakat dilibatkan dalam perumusan/ proses pembuatan keputusan dengan mengemukakan pendapat/ saran dalam menilai suatu program/ kebijakan yang akan ditetapkan.

2. *Participation in implementation*

Participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kontribusi masyarakat ini diuraikan seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan (material)

3. *Participation in benefit*

Participation in benefit atau partisipasi dalam kemanfaatan adalah wujud peran dimana dalam keikutsertaan tersebut dapat memberikan manfaat lebih/ positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan partisipasi tersebut masyarakat harus menerima manfaat positif yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut.

4. *Participation in evaluation*

Participation in evaluation atau keikutsertaan dalam evaluasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi dan menilai pelaksanaan hasil-hasil perencanaan. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik terhadap pelaksanaan pemerintahan agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Dalam jenis partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi nasabah dalam program BSPS masuk kedalam *Participation in implementation* atau partisipasi dalam pelaksanaan. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai penerima bantuan ini berkontribusi dengan tenaga dalam proses pembangunan, berkontribusi dengan uang yaitu dengan pemenuhan swadaya mereka untuk penambahan biaya program, dan juga berkontribusi dalam pemenuhan bahan. Sehingga dari hal tersebut, masyarakat nantinya akan memperoleh manfaat berupa rumah yang layak huni untuk ditinggali.

Peran masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah aset yang sangat penting dalam tatanan negara. Dalam partisipasi masyarakat dilakukan pada bidang fisik ataupun bidang materiil dan dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap sering tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Padahal, masyarakat adalah pihak yang paling mengetahui permasalahan mereka dan mengerti cara mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Sukardi dalam (Adon Nasrulloh 2017: 37-38) menyatakan bahwa hak masyarakat akan menjadi kenyataan apabila mereka dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan

yang memengaruhi mereka. Berdasarkan hal inilah partisipasi anggota masyarakat penerima bantuan dalam implementasi program BPSD dinilai penting pada pelaksanaannya.

1.5.2 Konsep Implementasi

Secara umum implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu proses implementasi sebagian besar dipengaruhi oleh macam-macam tujuan yang akan dicapai oleh cara tujuan itu dirumuskan. Rangkaian implementasi dalam suatu kebijakan dapat dilihat yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Suatu kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Suatu program, proyek, dan kegiatan merupakan bagian dari implementasi suatu kebijakan. Hasilnya berupa suatu produk yang merupakan materialisasi dari visi.

Menurut George C. Edward III (dalam Farida 2020: 39-40) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan mengharuskan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus disalurkan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi perubahan implementasi.

2. Sumberdaya, dalam suatu kebijakan yang telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut diwujudkan seperti sumber daya manusia maupun sumber daya finansial atau material lainnya.
3. Disposisi, adalah karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organik tidak fleksibel.

Program BSPS merupakan suatu kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk program. Pada program ini menekankan kepada masyarakat penerima bantuan sebagai implementor dalam mengimplementasikan program BSPS tersebut. Berdasarkan pandangan implementasi dari George C. Edward III variabel implementasi program BSPS di Kelurahan Gates Nan XX, komunikasi yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran yaitu Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Gates 1 dan 2 dilakukan dengan pemberian pemahaman dengan cara melakukan sosialisasi beberapa kali pada masyarakat.

Selanjutnya pada pelaksanaan program mengharuskan ketersediaan sumber daya yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk tenaga dan swadaya dari masyarakat. Disposisi sebagai variabel selanjutnya ditunjukkan oleh masyarakat ditunjukkan dengan komitmen dalam mengimplementasikan program BSPS mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penyelesaian atau pemanfaatan. Struktur birokrasi yang mudah mengakibatkan masyarakat bisa mengimplementasikan program dengan baik, yaitu dengan keterlibatan pihak kelurahan Gates Nan XX, serta pihak pelaksana tugas dari Satuan Kerja Penyediaan Perumahan sebagai pelaksana kebijakan program BSPS ini yang dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)

Berdasarkan variabel tersebut sebagai bentuk gambaran implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Implementasi ini dilakukan oleh masyarakat dengan melaksanakan mekanisme dan memenuhi persyaratan berupa sumber daya yang telah ditentukan sebelumnya.

1.5.3 Konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/ PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Menurut *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah suatu rumah dikatakan sebagai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bila tidak memenuhi lima kriteria, yaitu:

1. Ketahanan bangunan: komponen struktur dan non-struktur harus memenuhi kaidah konstruksi dan menggunakan bahan bangunan ber-SNI.
2. Luas bangunan: luas lantai perkapita harus minimal 7,2 m²
3. Sanitasi: setiap rumah harus memiliki kloset dengan leher angsa yang dapat tersambung ke SPAL/ *septic tank* yang disedot minimal 5 tahun sekali
4. Air minum: air minum harus tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna, tersedia minimal 12 jam sehari, dan jarak jangkauan maksimal 30 menit
5. Pencahayaan: pencahayaan harus 10% dari luas lantai
6. Penghawaan: penghawaan harus 5% dari luas lantai.

Berdasarkan data yang diperoleh dari satuan kerja penyediaan perumahan Provinsi Sumatera Barat banyak terdapat rumah dengan kriteria tidak layak huni. Salah satunya berada di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Pada wilayah ini banyak rumah masyarakat yang terdiri dari bahan bangunan seadanya dan juga tidak menggunakan sanitasi yang layak. Dari hal tersebut maka program BSPS banyak ditemukannya pada kelurahan ini untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat menjadi rumah layak huni.

1.5.4 Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah bantuan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan yang mana program ini

fokus pada pemberian bantuan pada bidang perumahan berupa bahan bangunan senilai 17,5 juta rupiah dan 2,5 juta rupiah untuk upah tukang atau pekerja pembangunan. Program ini ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam peningkatan kualitas rumah agar memperoleh rumah dengan kriteria rumah layak huni. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah atau pembangunan rumah baru beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum.

Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR No. 7 tahun 2022 tentang pelaksanaan Bantuan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus yang selanjutnya diturunkan pada Surat Edaran (SE) No. 14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya berdasarkan kebijakan umum program BSPS, terdapat beberapa kriteria masyarakat penerima program BSPS yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga (penghuni rumah yang terdaftar dalam satu KK) atau keluarga yang hanya beranggotakan 1 penyandang disabilitas atau minimal berusia 58 tahun
2. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan dan penguasaan yang jelas dan sah yang dapat dibuktikan dengan sertifikat tanah, akta hibah, akta jual beli, NIB, izin kepala adat, atau bukti lainnya yang sah
3. Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) satu-satunya dan memiliki dan dihuni minimal selama 3 tahun

4. Belum pernah memperoleh BSPS dan bantuan perumahan sejenis lainnya dalam 10 tahun terakhir, kecuali terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang
5. Penghasilan maksimal UMK/UMP
6. Bersedia mengikuti ketentuan program salah satunya bersedia berswadaya dan membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dengan pernyataan tanggung renteng.

Dalam penyelenggaraan program BPS di masing-masing kelurahan, masyarakat diharuskan untuk membentuk suatu kelompok sosial yang disebut dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Kelompok ini terdiri dari masyarakat penerima bantuan BPS dalam satu periode pelaksanaan yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan secara gotong royong. Gotong royong yang dimaksud untuk menanggung segala resiko secara bersama-sama (tanggung renteng) dalam menuntaskan kegiatan bantuan pembangunan rumah swadaya. Berdasarkan Surat Edaran (SE) No. 14/SE/Dr/2022 Lampiran II Bab II.B.2.d & Bab II.C.2.b terdapat syarat-syarat Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yaitu:

1. Dibentuk dan disepakati melalui rembuk warga
2. Terdiri atas unsur ketua, sekretaris, bendahara yang merangkap sebagai anggota, dan anggota kelompok lainnya.
3. Anggota kelompok paling banyak 20 orang atau mempertimbangkan karakteristik masyarakat dan kondisi di lapangan
4. Anggota kelompok bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama

5. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan secara gotong royong mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan bantuan pembangunan rumah swadaya.

Selain itu, berdasarkan surat edaran tersebut dalam pelaksanaan program BSPS ini terdapat mekanisme ataupun tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan. Mekanisme ini terdiri dari 4 tahapan utama kegiatan yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

- a. Pengusulan kegiatan
- b. Verifikasi penilaian usulan
- c. Penetapan lokasi BSPS Kota dan Kabupaten

2. Tahap Perencanaan

- a. Verifikasi Data Calon Penerima Bantuan (CPB)
- b. Penetapan lokasi BSPS desa atau kelurahan
- c. Penyiapan masyarakat
- d. Penetapan penerima bantuan
- e. Pencairan bantuan
- f. Penyaluran bantuan

3. Tahap Pelaksanaan

- a. Penyusunan Daftar Rencana Pembelian Bahan (DRPB)
- b. Kontrak toko/ penyedia bahan bangunan
- c. Penunjukan tukang/ pekerja
- d. Pembelian bahan bangunan (Tahap I atau II)

- e. Pekerjaan fisik (Tahap I atau II)
- f. Pembayaran upah kerja (Tahap I atau II)
- g. Penyusunan Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap I atau II

4. Tahap Pemanfaatan

- a. Penghunian dan pemeliharaan
- b. Pembinaan

Pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang terdapat 28 kepala keluarga penerima bantuan (PB). Di kelurahan ini terbentuk menjadi 2 kelompok penerima bantuan (KPB) yaitu KPB Gates 1 dan KPB Gates 2. Masing-masing kelompok penerima bantuan terdiri dari masing-masing ketua kelompok, sekretaris, bendahara, dan anggota yang terbentuk dari kegiatan rembuk warga. Dalam proses pembangunan masyarakat di wilayah ini menggunakan sistem tanggung renteng yang dimana dalam kelompok tersebut harus menanggung resiko dalam proses pembangunan, sehingga dari hal ini mengharuskan masyarakat untuk saling gontong royong agar tidak menerima resiko dalam pembangunan yang salah satunya adalah keterlambatan penyelesaian pembangunan. Resiko ini nantinya akan memperngaruhi dalam proses pemcairann upah tukang yang diterima masyarakat setelah proses pembangunan dinilai sebanyak 30-50% dan 100%. Apabila tidak menyelesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan sebelumnya, pencairan upah tukang akan mengalami penundaan.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Secara sederhana suatu teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya (Soekanto and Sulistyowati 2017: 25). Penggunaan teori dalam suatu penelitian berfungsi untuk mempertajam atau menganalisis fenomena pada suatu penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Sosial dari Max Weber yang termasuk pada Paradigma Definisi sosial. Menurut Weber dalam Ritzer (2014: 44), sosiologi merupakan ilmu yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (*interpretative understanding*) tindakan sosial serta antar hubungan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai kepada penjelasan kausal. Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran sosiologi yaitu:

1. Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif. Ini meliputi berbagai tindakan nyata
2. Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif
3. Tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Dalam Damsar (2017: 116-120), Weber membedakan tindakan sosial menjadi empat tipe yaitu:

1. Tindakan rasional instrumental, yaitu suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan dan pilihan yang sadar dalam kaitannya dengan tujuan suatu tindakan dan alat yang dipakai untuk meraih tujuan yang ada
2. Tindakan rasional nilai, yaitu tindakan di mana tujuan telah ada dalam hubungannya dengan nilai absolut dan nilai akhir bagi individu, yang dipertimbangkan secara sadar adalah alat mencapai tujuan
3. Tindakan afektif, yaitu tindakan yang didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar
4. Tindakan tradisional, yaitu tindakan karena kebiasaan atau tradisi.

Dalam menjelaskan tindakan sosial, Weber menentukan tipe ideal dan *Verstehen* sebagai metode Weber. Tipe ideal merupakan desain kategori-kategori interaksi dan bertujuan untuk mempermudah analisis masalah secara konkret. Sedangkan metode *verstehen* atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretatif yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti/ makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Terdapat beberapa cara untuk memahaminya melalui pemaknaan yaitu:

1. Rasional, yaitu sesuatu yang dipahami secara masuk akal
2. Empatik, yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain
3. Apresiatif, adalah cara pemahaman arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif tindakan orang lain.

Dalam menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan teori tindakan sosial sebagai alat analisis yang termasuk kedalam tipe tindakan tindakan rasional instrumenttal dan tindakan rasional nilai. Hal ini dikarenakan masyarakat penerima bantuan program dipandang sebagai aktor menetapkan tujuan dengan menerapkan cara-cara yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan yang dicapai oleh aktor atau penerima bantuan tersebut adalah untuk memperoleh rumah yang layak huni dan melakukan cara-cara untuk mencapai hal itu dengan berpartisipasi serta terlibat dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan pada program BSPS tersebut. Selain itu pada program ini masyarakat menggunakan sistem tanggung renteng yang mengharuskan masyarakat untuk bergotong royong pada pelaksanaan program BSPS. Hal ini memberikan gambaran bahwa anggota masyarakat sebagai penerima bantuan memiliki nilai solidaritas dan kebersamaan dalam melaksanakan program BSPS di kelurahan mereka sebagai anggota Kelompok Penerima Bantuan (KPB)

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan dengan topik penelitian yang diambil. Penelitian relevan dapat digunakan sebagai bahan acuan, dukungan, pedoman, serta perbandingan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Annisa Khairoza (2022) dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Penelitian ini

berjudul “Problematika Program Bedah Rumah di Nagari Padang Mentinggi Kecamatan Rao Pasaman.” Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan problematika program bedah rumah di lokasi penelitian. Problematika pelaksanaan program terjadi pada tahap pelaksanaan dan pasca pelaksanaan dimana peneliti menemukan pembagian program tidak tepat sasaran, spesifikasi rumah tidak sesuai ketentuan, swadaya masyarakat yang masih sedikit, dan kurangnya perhatian dari tetangga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan Teori Struktural Fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Annisa Khairoza bertujuan untuk mendeskripsikan pra pelaksanaan dan problematika pelaksanaan program BPS di Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao Pasaman dengan menggunakan teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Pada penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, proses pelaksanaan program, hingga hasil yang diperoleh oleh masyarakat setelah menerima program BPS di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang yang dianalisis menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. Sedangkan untuk persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian ini menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Dewi Herlina (2021) dari Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini berjudul “Analisis Program Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Menyediakan Rumah Layak Huni Di Kelurahan Berohol Kecamatan Bajenis, Kota Tebing, Tinggi.” Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam menyediakan rumah layak huni di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan memperoleh hasil yang dirangkum menjadi beberapa poin diantaranya standar dan saeana kebijakan mengacu kepada peraturan Menteri PUPR No. 13/PRT/M2026 sebagai pedoman dalam program BSPS. Sumber daya dalam program mengharuskan masyarakat untuk menambah biaya dari program dalam bentuk swadaya dan dilakukan dalam proses pelaksanaannya secara bergotong royong dengan kelompok, tetapi masih ditemukannya dilakukan secara individu. Selanjutnya hubungan antar organisasi dalam proses pelaksanaan program yang dilakukan secara terbuka oleh pelaksana program. Terakhir dampak sosial ekonomi, melalui program ini menjadikan kondisi mesehatan masyarakat menjadi lebih baik lagi.

Pada penelitian ini berfokus pada analisis yang dilakukan dari bidang ekonomi islam dengan beberapa landasan teori mengenai kesejahteraan sosial dan kebijakan publik. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan lebih berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BSPS di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Selain meneliti topik penelitian mengenai program BSPS, dalam penelitian ini juga terdapat persamaan mengenai metode penelitian yaitu metode kualitatif dengan tipe deskriptif.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fauzia Amalia (2020) dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Rumah Khusus Nelayan Di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program Rumah Khusus Nelayan di lokasi penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa ditemukannya beberapa kendala dalam pelaksanaan program rumah khusus nelayan. Tetapi pada sasaran kebijakan yaitu nelayan sudah memahami maksud dan tujuan dari kegiatan program dan juga adanya keikutsertaan pemerintahan tingkat kabupaten yang mendukung dari pelaksanaan program tersebut.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal ini seperti pada penelitian oleh Fauzia Amalia berfokus pada kajian-kajian mengenai kebijakan publik dan pembahasan topik mengenai rumah khusus nelayan di Nagari Koto Nan Tigo IV Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada kajian sosiologis terutama membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program BPS di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Tetapi terdapat persamaan penelitian dalam hal pembahasan implementasi dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Riska Amini (2019) dari Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Bantuan

Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan kendala dalam program BSPS di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasi program BSPS berpedoman pada Peraturan Menteri No. 39 tahun 2015. Tetapi dalam pelaksanaan terdapat kendala seperti belum tepatnya sasaran di dalam pelaksanaan program, dan belum meratanya penerima program BSPS di lokasi tersebut sehingga perlunya pihak pelaksana untuk mengoptimalkan program agar penerima selanjutnya lebih tepat sasaran dan merata.

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian oleh Riska Amini berfokus pada analisis dari perspektif kebijakan publik dan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada partisipasi masyarakat. Topik penelitian yang dilakukan memiliki persamaan yaitu menganalisis mengenai topik program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu diantara penelitian ini terdapat persamaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.

1. 6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan satu sudut pandang yang dipakai oleh para peneliti untuk menjawab permasalahan dari suatu penelitian (Afrizal 2014: 11-12).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan tindakan manusia serta

peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data yang diperoleh dan dengan demikian metode penelitian ini tidak menganalisis angka-angka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif secara umum adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Sehingga melalui defenisi tersebut, penggunaan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian ini yang berusaha untuk mendeskripsikan bentuk dan proses partisipasi masyarakat dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal 2014: 139). Informan merupakan seseorang yang memiliki informasi terkait data yang dibutuhkan dan sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Untuk menentukan informan perlu menggunakan metode. Metode yang digunakan dalam menentukan informan penelitian ini adalah dengan metode purposive sampling, merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2013: 85). Pada penelitian ini para informan akan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti.

Dalam penelitian, terdapat dua kategori informan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Afrizal (2014: 139) yaitu:

1. Informan pelaku, adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek penelitian itu sendiri. Oleh, sebab itu, ketika mencari informan, peneliti seharusnya seharusnya memutuskan dahulu posisi informan yang akan dicari, sebagai informan pengamatkah atau sebagai pelaku. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pelaku adalah masyarakat penerima bantuan atau disebut dengan Penerima Bantuan (PB) dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

Tabel 1.4
Daftar Informan Pelaku

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Status Informan
1.	Rini	38 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Gates 1 sekaligus Penerima Program BSPS
2.	Herman	52 Tahun	Nelayan	Ketua Kelompok Penerima Bantuan (KPB) Gates 2 sekaligus Penerima Program BSPS
3.	Rosdi Tanjung	66 Tahun	Buruh Nelayan	Penerima Program BSPS
4.	Eka Jaya	58 Tahun	Buruh Nelayan	Penerima Program BSPS
5.	Merawati	33 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Penerima Program BSPS
6.	Mira Sonita	40 Tahun	Pedagang	Penerima Program BSPS
7.	Efiar	54 Tahun	Pedagang	Penerima Program BSPS
8.	Wiwit	37 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Penerima Program BSPS
9.	Sarni	78 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Penerima Program BSPS
10.	Rina Erlina	48 Tahun	Ibu Rumah Tangga	Penerima Program BSPS

2. Informan pengamat, adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang-orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau pelaku kejadian yang diteliti. Dengan kata lain, mereka dapat disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pengamat diantaranya adalah Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) satuan kerja penyediaan perumahan Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggung jawab program BPS yang mendampingi masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan program BPS, instansi pemerintah setempat seperti Lurah serta masyarakat yang tinggal disekitar penerima bantuan (PB) program BPS tersebut.

Table 1.5
Daftar Informan Pengamat

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Status Informan
1.	Gita Rusady, ST.	28 Tahun	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) Program BPS	Informan Pengamat
2.	Nofiandi, S. Sos	44 Tahun	Lurah Kelurahan Gates Nan XX	Informan Pengamat
3.	Aliasmi Zesra, ST, MT	49 Tahun	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Satker Penyediaan Perumahan Prov. Sumatera Barat	Informan Pengamat
4.	Yuni Martini, ST, MT	55 Tahun	Koordinator Program BSPS Kota Padang dan Konsultan Individual	Informan Pengamat
5.	Maryani	43 Tahun	Masyarakat Disekitar Rumah Penerima Program BPS	Informan Pengamat

1.6.3 Data yang Diambil

Pada penelitian kualitatif, data yang yang diambil yaitu berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia, tanpa ada upaya untuk mengangkakan data yang diperoleh (Afrizal 2014:17). Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh serta diberikan langsung kepada peneliti. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan masyarakat penerima program BSPS, Tenaga Fasilitator Lapangan, dinas penyedia perumahan, instansi pemerintah tingkat kelurahan, serta masyarakat sekitar kelurahan Gates Nan XX.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak ditemukan secara langsung serta tidak diberikan langsung kepada peneliti. Berdasarkan hal ini, data sekunder pada penelitian ini diperoleh berupa informasi dalam literatur seperti jurnal, penelitian relevan, laporan pemerintah, laporan kelompok penerima bantuan program BSPS, foto data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, website, maupun informasi yang dipublikasikan lainnya.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik dalam pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan

data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono 2013: 224). Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu wawancara tanpa alternatif pilihan jawaban dan dilakukan untuk mendalami informasi dari seorang informan. Menurut Taylor dalam Afrizal (2014: 136). Pewawancara perlu mendalami informasi dari seseorang informan, maka wawancara mendalam perlu dilakukan berulang-ulang kali antara pewawancara dengan informan. Pernyataan berulang kali ini bukan berarti mengulangi pertanyaan yang sama, melainkan menanyakan hal-hal atau informasi berbeda kepada informan yang sama bertujuan untuk klarifikasi informasi yang sudah didapat dalam wawancara sebelumnya atau mendalami hal-hal yang muncul dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan seorang informan.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah masyarakat penerima bantuan BPS, tenaga fasilitator lapangan, pihak satuan penyedia perumahan, instansi pemerintah tingkat kelurahan, dan masyarakat di sekitar lokasi rumah penerima bantuan BPS. Alasan pemilihan teknik wawancara mendalam dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mendapatkan informasi secara mendalam dan memperoleh hasil secara deskriptif mengenai bentuk dan proses partisipasi masyarakat dalam implementasi program BPS serta mengetahui hasil yang diperoleh masyarakat penerima program BPS tersebut.

Pada tanggal 27 Juni 2024, peneliti mendatangi Lurah Gates Nan XX guna meminta izin melakukan penelitian di kelurahan tersebut dengan menyerahkan surat izin penelitian dari fakultas yang sebelumnya peneliti peroleh. Selanjutnya surat ini ditanggapi oleh sekretaris kelurahan dengan mengarahkan peneliti untuk meminta surat izin rekomendasi terlebih dahulu ke pihak Kecamatan Lubuk Begalung karena menurutnya untuk penelitian ini harus sesuai dengan prosedur pemerintahan terkait. Setelah menerima arahan tersebut, peneliti langsung menuju kantor kecamatan guna meminta izin penelitian, dan sesampainya di kantor tersebut, peneliti langsung diarahkan kepada kasi perizinan dan pendapatan dan menurut beliau, peneliti diharuskan untuk meminta surat rekomendasi penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMDPTSP) Kota Padang terlebih dahulu, dan peneliti langsung mengurus surat tersebut ke kantor dinas yang dimaksud.

Pada tanggal 2 Juli 2024, surat izin penelitian dari Dinas PMDPTSP keluar dan esok hari pada tanggal 3 Juli 2024 peneliti mendatangi kantor Kecamatan Lubuk Begalung untuk meminta kembali surat izin penelitian dan setelah itu kembali mendatangi kantor Lurah Gates Nan XX untuk menyerahkan surat perizinan penelitian dari kampus, dinas kota, dan kecamatan. Dihadiri yang sama, peneliti melakukan wawancara dengan lurah Gates Nan XX yaitu dengan Bapak Nofiandi S.Sos terkait bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi pada program BSPS beberapa waktu lalu dengan berpedoman kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Selain melakukan wawancara dengan lurah, peneliti juga

meminta beberapa data pendukung terkait kondisi masyarakat serta melakukan wawancara dengan staf kelurahan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Gates Nan XX.

Peneliti melanjutkan penelitian pada Kamis, 11 Juli 2024 dengan mendatangi rumah masing-masing guna mewawancarai Bapak Rosdi Tanjung, Bapak Eka Jaya, dan Ibuk Merawati. Pada hari Selasa, 16 Juli 2024 peneliti mewawancarai Ibuk Mira Sonita, Bapak Efiar, dan Bapak Herman sebagai penerima bantuan di masing-masing rumah mereka. Setelah itu guna memperoleh informasi mengenai program lebih dalam, peneliti melakukan wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat yaitu dengan Bapak Aliasmi, ST.,MT. sekaligus meminta beberapa data pendukung penelitian tentang program BSPS dan menanyakan terkait proses dan kendala masyarakat di lapangan yang seringkali terjadi terkhusus pandangan beliau pada Kelurahan Gates Nan XX dalam menjalankan program BSPS.

Merasa masih membutuhkan data mengenai bentuk dan proses partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program BSPS di Kelurahan Gates Nan XX, peneliti kembali melakukan wawancara dengan penerima bantuan (PB) yaitu pada hari Senin, 22 Juli 2024 dengan Ibuk Wiwit dan Ibuk Sarni. Pada hari Kamis, 25 Juli 2024 kembali melakukan penelitian dilapangan dengan mewawancarai Ibuk Rina Erlina, pada hari itu peneliti hanya mewawancarai satu orang saja dikarenakan pada saat mendatangi penerima bantuan lainnya, terdapat kendala dikarenakan informan tidak

berada dirumahnya sehingga kegiatan wawancara harus tertunda. Pada hari Jumat, 26 Juli 2024 peneliti melakukan wawancara dengan Ibuk Yuni Martini, ST.,MT, selaku koordinator kota pada program BSPS sebagai informan pengamat untuk melakukan triangulasi data dari beberapa informasi informan pelaku yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya pada hari Senin, 29 Juli 2024, peneliti melakukan wawancara dengan Kak Rini selaku ketua kelompok penerima bantuan program BSPS yang sempat tertunda beberapa waktu yang lalu. Pada kegiatan ini Kak Rini selaku ketua memiliki pandangan tersendiri terkait bagaimana anggota kelompoknya dalam melaksanakan program BSPS dan sekaligus membahas bagaimana partisipasinya sendiri dalam program. Setelah melakukan wawancara dengan Kak Rini, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang tetangga atau masyarakat yang berada di sekitar rumah penerima program BSPS, yaitu ibu Maryani. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau untuk menanyakan beberapa hal mengenai bagaimana masyarakat di daerah ini dalam melaksanakan program BSPS sejauh pengamatan dari beliau, dan hal ini berguna untuk mendukung data yang telah peneliti peroleh sebelumnya dari beberapa informan pelaku. Selanjutnya, dari beberapa data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian lapangan, peneliti melakukan analisis data dengan terlebih dahulu membuat transkrip penelitian dan menandakan beberapa hal penting yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Pada hari Senin, 26 Agustus 2024, peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) program BSPS di

Kecamatan Lubuk Begalung yang salah satunya berada di Kelurahan Gates Nan XX. Fasilitator lapangan ini bertugas untuk mendampingi masyarakat dan memfasilitasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program BSPS. Wawancara ini peneliti lakukan di rusunawa RS Unand dikarenakan salah seorang anggota keluarga dari informan melakukan kontrol kesehatan pada RS Unand tersebut. Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat janji untuk bertemu dan menanyakan beberapa tindakan dan bagaimana proses masyarakat dalam berpartisipasi pada program serta menanyakan bagaimana beliau dalam proses pendampingan masyarakat dan diakhiri dengan mengambil foto dokumentasi guna melengkapi bagian lampiran pada laporan penelitian ini.

Pada tanggal 24 September 2024, peneliti kembali melakukan penelitian lapangan dikarenakan masih membutuhkan data pendukung pada penelitian. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Kelurahan Gates Nan XX, melakukan wawancara kemabli dengan informan pelaku untuk memenuhi data yang masih kurang, dan juga mendatangi Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat. Pada saat di kantor kelurahan, peneliti menemui staf kelurahan untuk mencari data terkait komposisi penduduk pada Kelurahan Gates Nan XX tetapi pihak kelurahan tidak memiliki data tersebut. Selain itu peneliti juga melakukan pencarian data di Kantor Penyediaan Perumahan untuk mencari data progres pelaksanaan program di beberapa kelurahan, tetapi data yang peneliti butuhkan juga tidak tersedia. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data

yang tersedia yang diperoleh pada saat penelitian lapangan sebelumnya di beberapa bulan yang lalu.

Kendala yang peneliti hadapi selama melakukan penelitian adalah beberapa informan hanya menjawab secara singkat atas pertanyaan-pertanyaan peneliti berikan. Oleh karena itu, peneliti harus kembali membangun pertanyaan yang memiliki maksud yang hampir sama untuk mendapatkan jawaban yang mendalam. Selain itu, kesibukan beberapa orang informan membuat peneliti harus menunggu dan beberapa kali wawancara harus tertunda. Namun demikian, para informan menerima dengan baik kedatangan peneliti. Mereka dengan antusias memberikan bantuan jika peneliti membutuhkan data tambahan sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, peneliti menjadi terbantu dan merasa nyaman selama proses penelitian.

2. Studi dokumen

Hasil wawancara mendalam dari kegiatan penelitian perlu diperkuat dengan studi dokumen. Dalam penelitian ini studi dokumen berupa jurnal, literatur, penelitian terdahulu, laporan yang berkaitan dengan penelitian dan juga referensi dari internet. Peneliti juga meninjau dokumen pendukung berupa SK penetapan penerima bantuan BSPS, laporan pelaksanaan, dan juga laporan absensi dari kegiatan rembuk atau sosialisasi dari kegiatan. Dalam pelaksanaannya, pada tanggal 3 Juli 2024 peneliti meminta data berupa dokumen di kantor Kelurahan Gates Nan XX. Pada tanggal 16 Juli 2024 peneliti kembali meminta beberapa data pendukung di Kantor Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian merujuk pada satuan tertentu yang diperhitungkan untuk subjek penelitian. Unit analisis berguna untuk memfokuskan kejian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu dalam masyarakat yang memiliki kriteria sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu masyarakat penerima bantuan (PB) pada program BSPS di Kelurahan Gates Nan XX, dan pihak tenaga fasilitator lapangan yang bertugas dalam mendampingi masyarakat pada persiapan dan pelaksanaan program.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data bertujuan untuk menggali makna dan pola dalam data yang telah diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif tidak suatu proses kuantifikasi data, melainkan suatu proses pengolahan data mentah berupa penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang lain dimungkinkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Luaran analisis data bukan angka, bukan signifikansi hubungan yang dinyatakan dengan angka, bukan pula distribusi, melainkan kategori atau klasifikasi atau tipologi (Afrizal 2014: 175)

Merujuk pada buku Metode Penelitian Kualitatif Afrizal, maka peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan analisis data oleh Miles dan Huberman. Menurutnya terdapat 3 tahap dalam analisis ini, yaitu:

1. Tahap kodifikasi data/ tahap reduksi data

Kodifikasi data merupakan tahap dimana peneliti memberikan penamaan terhadap hasil penelitian. Cara melakukannya, peneliti menulis ulang catatan penting pada penelitian. Dalam berbentuk rekaman wawancara, maka peneliti memindahkannya ke dalam bentuk transkrip terlebih dahulu. Setelah selesai, kemudian peneliti membaca dan mulai mereduksi informasi yang penting dan tidak penting dengan memberikan tanda pada transkrip tersebut.

2. Tahap penyajian data

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis di mana peneliti menyajikan temuan peneliti berupa kategori atau pengelompokan (Afrizal 2014: 179). Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan menggunakan matrik. Matrik yang peneliti buat berisikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentuk dan proses masyarakat dalam berpartisipasi pada implementasi program BSPS di Kelurahan Gates Nan XX.

3. Tahap penarikan kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan di mana pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari temuan data.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap dimana peneliti mencoba memverifikasi atau menarik kesimpulan berdasarkan hasil dari temuan lapangan. Setelah kesimpulan diperoleh, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara meninjau ulang rangkaian coding dan penyajian data (Afrizal 2014:180)

Merujuk pada penelitian partisipasi masyarakat dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Gates Nan XX, setelah melakukan wawancara mendalam peneliti mengubahnya ke dalam bentuk transkrip. Melalui transkrip tersebut, peneliti mereduksi data sembari memberikan tanda pada hal-hal yang penting. Langkah terakhir adalah dengan penarikan kesimpulan.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi dari sebuah penelitian dan merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan atau dengan kata lain lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai setting dalam sebuah konteks penelitian (Afrizal 2014: 128). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan pada tujuan penelitian peneliti yaitu untuk mendeskripsikan bentuk dan proses partisipasi masyarakat dalam implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan yang paling banyak penerima program BSPS pada tahap VII Tahun 2023.

Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan dibandingkan beberapa kelurahan lainnya, kelurahan ini merupakan kelurahan yang paling cepat dalam proses pelaksanaan program BSPS berdasarkan rapat evaluasi akhir Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat dari target penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pada bulan November 2023. Alasan selanjutnya, pada kelurahan ini terdapat 27 penerima bantuan (PB) yang terdiri dua kelompok penerima bantuan (KPB) berbeda, sehingga dengan hal tersebut peneliti bisa

mendeskripsikan bagaimana mereka dalam berpartisipasi khususnya pada kelompok penerima bantuan dalam proses pelaksanaan program BSPS tersebut.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

Peneliti merumuskan definisi operasional konsep untuk memudahkan pendefinisian suatu konsep dalam penelitian agar dapat diamati, dipahami serta ditafsirkan. Adapun definisi operasional konsep yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

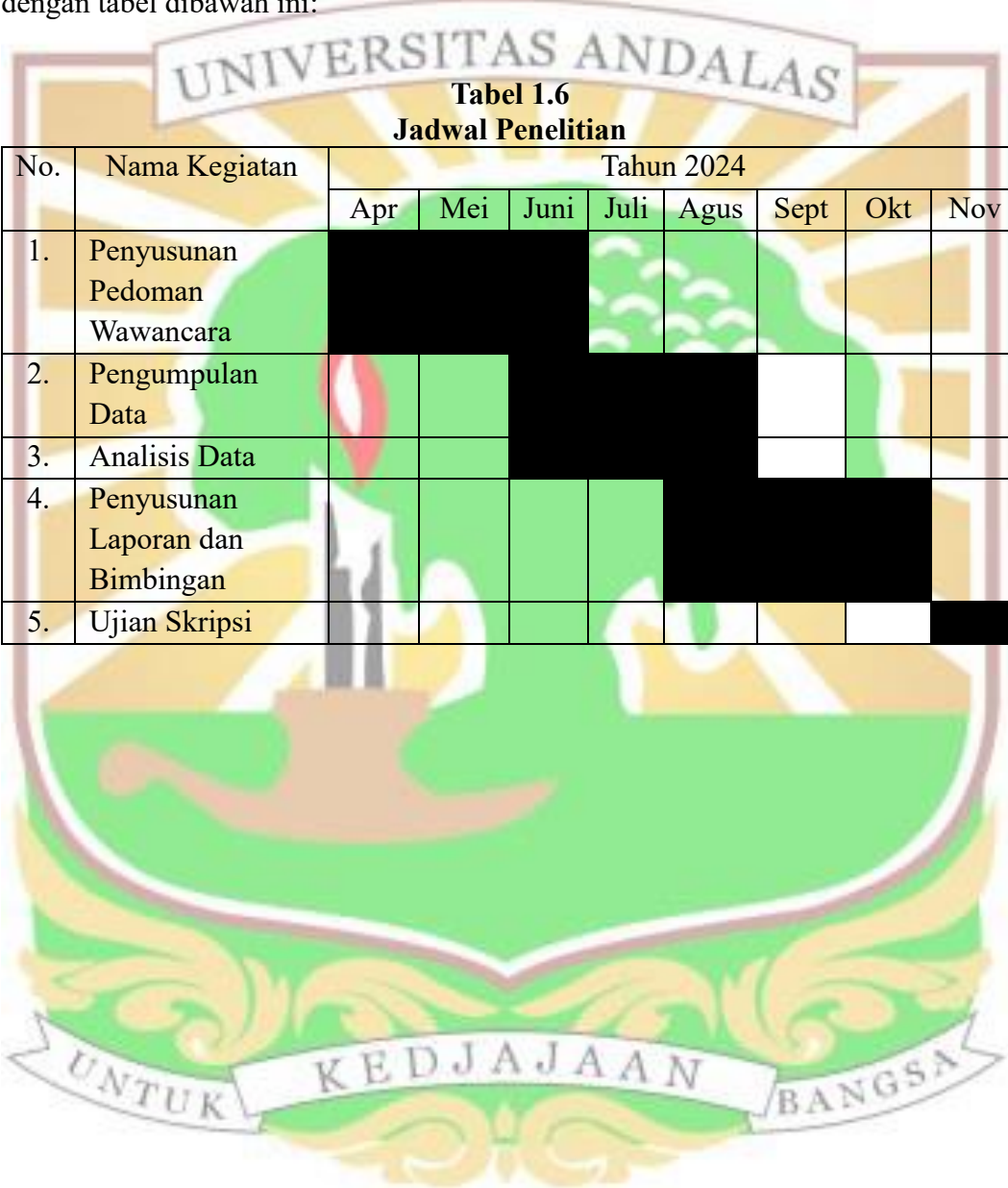
1. Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan suatu kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Pada definisi operasional konsep ini ditujukan kepada bagaimana partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan program BSPS dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan.
2. Implementasi merupakan suatu tindakan pelaksanaan atau penerapan pada suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada penelitian ini, implementasi program mengacu kepada bagaimana tindakan pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat dari tahap pelaksanaan hingga pemanfaatan pada program BSPS tersebut untuk mencapai tujuan yaitu membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh rumah layak huni
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya merupakan suatu program pemerintah ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah yang tidak layak huni untuk memperoleh rumah layak huni dengan

bantuan senilai 20 juta rupiah yang bersifat stimulan dan mengharuskan masyarakat untuk memiliki swadaya mereka.

4. Dana stimulan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pada program BSPS yang bertujuan untuk mendorong dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan program tersebut.
5. Swadaya merupakan suatu bentuk kemampuan masyarakat yang dimiliki untuk melaksanakan suatu program. Kemampuan swadaya yang dimiliki masyarakat pada program ini baik berupa dana, tenaga, hingga materi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut untuk melaksanakan program BSPS.
6. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan oleh pemerintah yang dalam hal ini berupa dukungan untuk memperoleh rumah yang layak huni. Masyarakat yang digolongkan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang memperoleh pendapatan dibawah upah minimum kota (UMK) atau upah minimum provinsi (UMP)
7. Anggota masyarakat adalah individu yang menjadi bagian dari suatu kelompok sosial yang lebih besar. Dalam hal ini anggota masyarakat adalah penerima bantuan yang merupakan bagian dari masyarakat di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.
8. Penerima bantuan adalah anggota masyarakat yang menjadi penerima bantuan pada program BPS Tahap VII tahun 2023 di Kelurahan Gates Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama tujuh bulan, mulai dari bulan April sampai bulan Oktober tahun 2024. Untuk penjelasan selanjutnya jadwal penelitian sesuai dengan tabel dibawah ini:



Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2024							
		Apr	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov
1.	Penyusunan Pedoman Wawancara	■	■	■	■	■	■	■	■
2.	Pengumpulan Data	■	■	■	■	■	■	■	■
3.	Analisis Data	■	■	■	■	■	■	■	■
4.	Penyusunan Laporan dan Bimbingan	■	■	■	■	■	■	■	■
5.	Ujian Skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■